

SMK PIRI 2 YOGYA Pelatihan Bahasa Inggris

YOGYA (KR) - SMK PIRI 2 Yogyakarta mengadakan pe-mantapan dan persiapan dunia kerja, perguruan tinggi dan entrepreneurship di Aula Sekolah. Tentu dalam pelaksanaannya tetap mengedepankan 4M. Adapun salah satu bentuknya dengan mengadakan kegiatan kursus Bahasa Inggris gratis. Ide untuk melakukan pelatihan tersebut muncul karena banyak tenaga profesional di Indonesia yang mengalami kendala dalam penguasaan bahasa asing (Inggris).

"Setelah menjadi trainer calon tenaga kerja profesional Indonesia ke luar negeri, gaji besar tapi mereka terkendala kemampuan berbahasa Inggris. Dari situ saya tergerak untuk memprovokasi siswa-siswa saya untuk berani bersaing dengan tenaga kerja asing di luar negeri yang gaji puluhan juta, daripada rebutan dengan gaji UMR," kata Yono SPd, Englishopedia Institut didampingi Kepala SMK PIRI 2 Yogyakarta Hadiyanto Sahputra ST MPd di Yogyakarta, Jumat (8/1).

Hadiyanto mengungkapkan, melalui kelas gratis tersebut pihaknya ingin menyebarkan virus bahwa bahasa Inggris itu wajib. Walaupun dalam pelaksanaannya terkadang mengalami sejumlah kendala. Khususnya yang berkaitan dengan kendala pola pikir siswa yang ingin mendapatkan hasil cepat dalam waktu singkat. "Banyak yang tanya jika ikut kursus Bahasa Inggris ada jaminan lancar dalam waktu 2 bulan bisa lancar bahasa Inggris. Mereka lupa bahwa untuk mendapatkan hasil baik membutuhkan berproses," (Ria)-d

PEMBELAJARAN MASIH DARING Siswa Kelas 1 SD Alami Keterlambatan Calistung

YOGYA (KR) - Semester genap ini pembelajaran masih dilakukan secara daring. Bagi siswa kelas 1 SD dikhawatirkan ada keterlambatan dalam hal baca, tulis dan berhitung. Pihak sekolah sejauh ini hanya bisa mengintensifkan konsultasi melalui daring agar dalam semester genap ini siswa kelas 1 makin lancar membaca, menulis dan berhitung.

Kepala SDN Pujokusuman 1 Dwi Atmi Sutarini mengatakan, kemampuan membaca, menulis dan berhitung bagi kelas 1 belum merata. Hal ini menjadi fokus yang harus dilakukan bagi para guru apalagi di semester genap ini, para siswa diharapkan lebih lancar membaca, menulis dan berhitung.

"Semester lalu, siswa yang belum lancar baca tulis masih diperbolehkan datang ke sekolah didampingi orang tua untuk melakukan konsultasi ke guru. Namun semester ini kebijakan itu belum diperbolehkan lagi," kata Sutarini,

Jumat (8/1).

Sutarini tak menampik, pembelajaran di rumah ini menyebabkan keterlambatan progres siswa kelas 1 khususnya dalam hal baca tulis. Yang biasanya siswa dan guru bisa melakukan tatap muka dan ketika ada sesuatu yang belum jelas bisa langsung ditanyakan di kelas. Namun karena belajar daring, ada jeda waktu untuk mengetahui progres tiap siswa.

Hal ini juga masih ada kendala, kepemilikan handphone tiap siswa berbeda. "Orang tua memang harus berperan aktif mendampingi anaknya agar bisa lancar membaca, menulis dan berhitung. Meski belum bisa konsultasi di sekolah, siswa tetap bisa konsultasi melalui telepon," tandas Sutarini.

Kepala SDN Karanganyar Kota Yogya Murwani Rini Giasuti menambahkan, keterlambatan progres baca, tulis dan berhitung untuk siswa kelas 1 ini akan makin terlihat

ANAK USIA SEKOLAH SUMBANG 59.776 KASUS COVID-19

Pembelajaran Tatap Muka Harus Utamakan Keselamatan Siswa

JAKARTA (KR) - Pembelajaran tatap muka harus mengutamakan keselamatan murid. Satgas Penanganan Covid-19 telah berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk kesiapannya.

"Pemerintah pusat telah mengizinkan sekolah-sekolah untuk menyelenggarakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) mulai 1 Januari 2021. Namun, pembukaan kembali sekolah harus mengutamakan keselamatan siswa-siswi yang masuk rentang usia anak sekolah," ujar Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmita di Jakarta, Jumat (8/1).

Ditegaskan, PTM akan dilaksanakan jika persyaratan-persyaratan yang ditentukan sudah terpenuhi. Hal itu merupakan kewenangan Pemda, Kanwil atau Kantor Kementerian Agama dan persetujuan orangtua. Hal ini sesuai

Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 20 November 2020. "Namun, kesiapan pembukaan pembelajaran tatap muka ini, juga perlu memperhatikan data perkembangan kasus Covid-19, khususnya pada usia anak sekolah," jelas Wiku .

Karena terdapat kekhawatiran terhadap anak-anak rentang usia sekolah yang dapat tertular Covid-19. Secara persentasenya, rentang usia anak sekolah menyumbang sebesar 8,87% dari total kasus nasional. Atau usia sekolah menyumbang 59.776 kasus dari total kasus

kumulatif. Dari total kasus tersebut, anak pada usia setara pendidikan SD yaitu 7 - 12 tahun menyumbang angka kasus terbanyak yaitu 17.815 kasus (29,8%). Diikuti usia setara SMA yaitu 16 - 18 tahun di angka 13.854 kasus (23,17%), usia setara SMP yaitu 13 - 15 tahun sebanyak 11.239 kasus (18,8%), usia setara TK yaitu 3 - 6 tahun sebanyak 8.566 kasus (14,3%) dan usia PAUD yaitu 0 - 2 tahun sebanyak 8.292 kasus (13,8%).

"Jika kita menelaah dari trennya, kita bisa melihat adanya peningkatan kasus konfirmasi pada setiap penggolongan umur, bahkan terbesar setara TK, PAUD dan SD. Kenaikannya di atas 50 persen hanya dalam kurun waktu 1 bulan," lanjut Wiku.

Dari sebaran daerahnya, DKI

Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Riau, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Sumatera Barat dan Banten konsisten menempati peringkat 10 besar daerah dengan konfirmasi tertinggi pada rentang usia sekolah. Dimana DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah konsisten menempati peringkat 4 teratas pada seluruh golongan umur rentang usia sekolah.

"Data ini disampaikan bukan untuk menakut-nakuti, melainkan bentuk transparansi Satgas kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Data ini selayaknya dijadikan dasar pertimbangan sebelum mengeluarkan izin pembelajaran tatap muka. Daerah yang merasa kasus positifnya tinggi, diharapkan fokus terlebih dahulu pada penanganan pandemi," tegas Wiku. (Ati)-d

KPI UMY 15 Tahun Pertahankan Akreditasi A

BANTUL (KR) - Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) kembali mempertahankan Akreditasi A untuk yang ke-4 kali. Prestasi ini berarti, akreditasi yang diraih program studi yang berada di bawah Fakultas Agama Islam (FAI) ini sudah memasuki tahun ke-15. Raihan akreditasi berdasar Surat Keputusan Nomor 112/SK/BAN-PT/Ak-PPK/S/I/2021 yang dikeluarkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang berlaku sampai tahun 2025 mendatang.

Ketua Program Studi KPI Twediana Budi Hapsari PhD kepada *KR*, Jumat (8/1) menyebutkan, diraihnya akreditasi A untuk yg ke-4 kalinya ini merupakan bukti bahwa KPI berhasil mempertahankan kualitas. Baik dari sisi manajemen pengelolaan prodi, proses belajar mengajar, hingga kualitas alumni KPI. Skor akreditasi yang diraih oleh KPI masih bertahan pada angka 369 sama seperti periode akreditasi sebelumnya.

"Ini tentu saja meningkatkan rasa percaya diri para mahasiswa dan alumni. Sehingga animo mahasiswa baru bertambah, karena rekomendasi kakak kelas se-

waktu SMA atau saudara/kenalan yang telah menjadi mahasiswa di prodi ini," jelas Twediana.

Bahkan sejak tahun 2016 juga prodi KPI telah memiliki kelas Internasional yang diberi nama IPICom (International Program for Islamic Communication) dengan bahasa pengantar Arab - English. Juga ada mahasiswa asing Angkatan 2020 asal Gambia, Aji Fatou Jameh.

Disebutkan Twediana, sejak tahun 2012, KPI merintis konsentrasi Komunikasi Islam dan Konseling Islam. Tahun 2016 diperkuat dengan rekonstruksi Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) berbasis KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) yang memberikan pilihan kepada mahasiswa untuk mendalami salah satu dari 2 profesi yaitu Komunikasi Islam dan Konseling Islam.

"Komunikasi Islam membentuk keterampilan mahasiswa untuk mendalami keterampilan bidang penyiaran dan jurnalistik, khususnya di bidang dakwah Islam. Sedangkan konseling Islam mengarahkan mahasiswa untuk menjadi Konselor Islam," katanya. (Fsy)-d

EKONOMI

JNE Gandeng Rumah Zakat

JAKARTA (KR) - JNE menjalin kerja sama dengan Rumah Zakat untuk memudahkan dalam menyalurkan zakat, infak, sedekah serta dana sosial lainnya untuk pemberdayaan masyarakat. Program yang dilakukan diperuntukkan mendukung pemerataan layanan zakat, infak dan sedekah di seluruh Indonesia.

Kerja sama ini diwujudkan melalui program Sahabat Kebajikan Rumah Zakat dan JNE yang peluncurannya ditandai dengan acara seremonial penandatanganan MoU di Kantor Pusat JNE Jl Tomang Raya 11 Jakarta Barat. Presiden Direktur JNE Mohamad Feriadi Soeprapto menuturkan, kegiatan ini sebagai wujud syukur JNE yang telah menyampaikan amanah paket pelanggan selama 3 dekade. Selain itu sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dalam membantu masyarakat untuk memberikan kemudahan dalam berbagi untuk kebaikan.

"Program Sahabat Kebajikan Rumah Zakat merupakan platform kebaikan yang dapat digunakan oleh mitra untuk mengajak donatur untuk berdonasi zakat, infak, sedekah berbasis sistem affiliate marketing. Donatur dapat mendatangi sales counter JNE, untuk melakukan pembayaran zakat dengan menggunakan metode pembayaran antara lain dompet elektronik, transfer bank dan kartu kredit," katanya di Jakarta, Jumat (8/1).

Feriadi menambahkan, pembayaran zakat baru dapat dilakukan di 12 Kantor Perwakilan JNE wilayah DKI Jakarta, dan selanjutnya akan berlaku di seluruh sales counter JNE secara bertahap hingga pertengahan tahun 2021. Selain itu donatur yang ingin bergabung bisa langsung melakukan registrasi secara online dan lebih mudah di website rumah zakat. Platform ini dilengkapi dengan landing page khusus, sehingga lebih informatif dan menggunakan sistem one klik. (Ira)-d

Cadangan Devisa RI Meningkat

JAKARTA (KR) - Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Desember 2020 sebesar 135,9 miliar dolar AS. Angka ini meningkat dibandingkan dengan posisi pada akhir November 2020 sebesar 133,6 miliar dolar AS.

"Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 10,2 bulan impor atau 9,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan," kata Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono di Jakarta, Jumat (8/1)

Dikatakan, peningkatan posisi cadangan devisa pada Desember 2020 terutama dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri pemerintah dan penerimaan pajak. "Ke depan, BI memandang cadangan devisa tetap memadai, didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga, seiring dengan berbagai respons kebijakan dalam mendorong pemulihan ekonomi," katanya. (Lmg)-d

AS MASIH JADI ANDALAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Ekspor DIY Tertekan, Impor Justru Naik

YOGYA (KR) - Nilai ekspor DIY pada November 2020 mencapai USD 34,7 juta atau turun 16,79 persen dibanding ekspor bulan sebelumnya sebesar USD 41,7 juta. Sementara nilai impor DIY justru naik 102,30 persn atau sebesar USD 17,6 juta pada November 2020 dibandingkan Oktober 2020.

"Nilai ekspor DIY secara kumulatif selama Januari sampai November 2020 mencapai USD 353,7 juta atau turun 3,62 persen dibanding periode yang sama 2019," ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) DIY Heru Margono di Yogyakarta, Jumat (8/1).

Heru mengatakan, secara umum tiga besar negara tujuan utama ekspor barang DIY yaitu Amerika Serikat (AS) dengan to-

tal nilai ekspor mencapai USD 12,7 juta disusul Australia dengan total nilai USD 4,4 juta dan Jerman dengan total nilai USD 2,9 juta pada November 2020. Pakaian Jadi Bukan Rajutan (62), Perabot, Penerangan Rumah (94) dan Barang-barang Rajutan (61) merupakan tiga kelompok komoditas dengan nilai ekspor tertinggi pada November 2020 masing-masing sebesar USD 10,4 juta, USD

5,8 juta dan USD 3,5 juta.

"Nilai ekspor DIY berdasarkan sektor yang terdiri dari pertanian dan industri pengolahan masing-masing USD 0,3 juta dan USD 34,4 juta pada November 2020. Sementara itu, nilai ekspor masing-masing sektor tersebut mencapai USD 0,4 juta dan USD 41,3 juta selama Oktober 2020," katanya.

Lebih lanjut Heru menyampaikan, nilai impor DIY pada November 2020 mencapai USD 17,6 juta yang naik USD 8,9 juta atau mengalami peningkatan 102,30 persen dibanding bulan sebelumnya. Kondisi tersebut disebabkan oleh impor dari 7 negara asal barang utama mengalami kenaikan. "Impor dari AS menurun

jukkan kenaikan terbesar yaitu USD 4,8 juta atau 700 persen. Taiwan merupakan satu-satunya negara asal barang dengan penurunan nilai impor yaitu sebesar USD 0,1 juta atau setara 8,33 persen," imbuhnya.

Negara pemasok barang impor di DIY terbesar selama November 2020 adalah AS dengan nilai USD 4,8 juta disusul China USD 4,3 juta dan Hongkong USD 2,8 juta. Lokomotif dan Peralatan Kereta Api (86), Filamen Buatan (54) dan Kopi, Teh, Rempah-rempah (09) merupakan tiga besar kelompok komoditas impor pada November 2020 masing-masing sebesar USD 3,5 juta, USD 1,9 juta dan USD 1,8 juta. (Ira)-d

PBI Terbaru Atur Sistem Pembayaran

JAKARTA (KR) - Bank Indonesia (BI) melakukan reformasi pengaturan sistem pembayaran melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran (PBI Sistem Pembayaran) yang mulai berlaku pada 1 Juli 2021. PBI ini antara lain memperkuat aturan mengenai akses ke penyelenggaraan sistem pembayaran (access policy), penyelenggaraan sistem pembayaran hingga pengakhiran penyelenggaraan sistem pembayaran (exit policy), fungsi BI di bidang sistem pembayaran, pengelolaan data secara terintegrasi, dan perluasan ruang uji coba inovasi teknologi.

"Ini Peraturan Bank Indonesia yang terbaru tentang sistem pembayaran. PBI merupakan payung hukum di sistem pembayaran. Namanya payung, berusaha untuk memayungi ini merupakan hasil kerja sama yang terkait dengan departemen kebijakan sistem pembayaran. PBI ini sudah diterbitkan di tanggal 30 Desember 2020 dan mulai berlaku tanggal 1 Juli 2021," kata Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendrarta, pada acara BBM (Bincang- Bincang Media) secara virtual di Jakarta, Jumat (8/1).

Dikatakan, pengaturan dalam PBI Sistem Pembayaran didasarkan pada pendekatan berbasis aktivitas dan risiko sehingga tidak bersifat diberlakukan sama untuk semua (*one size fits all*), khususnya dalam *access policy* dan penyelenggaraan sistem pembayaran serta pengawasan oleh BI.

Selain itu, pengaturan dalam PBI Sistem Pembayaran juga mengedepankan *principle-based regulation* dan mendorong optimalisasi penguatan fungsi *Self Regulatory Organization* (SRO). "Penerbitan ketentuan ini merupakan wujud implementasi dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 yang salah satu inisiasinya adalah mengintegrasikan pengaturan, perizinan, pengawasan, dan pelaporan yang diawali dengan reformasi pengaturan sistem pembayaran," jelas Filianingsih. (Lmg)-d



KR-Istimewa

Chief Corporate Affairs XL Axiata Marwan O Baasir meninjau proses uji coba Dynamic Spectrum Sharing

bang hingga ke Merauke, termasuk di kawasan perkotaan maupun pedalaman, dengan 100% jaringan LTE.

Director & Chief Technology Officer XL Axiata, I Gede Darmayusa, mengatakan, cepat atau lambat layanan 5G sudah pasti akan diimplementasikan di Indonesia. "Karena itu kami tidak pernah berhenti untuk menyiapkan jaringan kami lewat serangkaian inovasi. Akan tetapi, layanan 5G tentu saja membutuhkan kesiapan ekosistem lainnya, termasuk ketersediaan

spektrum 5G dengan lebar pita yang optimal," katanya di Jakarta, Jumat (8/1).

Peningkatan kapasitas dan efisiensi jaringan dilakukan secara menyeluruh, baik pada jaringan radio, transport maupun core. Pada sisi radio, peningkatan dilakukan dengan modernisasi perangkat radio serta implementasi Carrier Aggregation. Selain itu, dalam rangka inovasi untuk meningkatkan penetrasi jaringan, XL Axiata juga melakukan uji coba teknologi Open RAN. (Rsv)-d